

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM adalah salah satu unit usaha penggerak terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM telah diakui sebagai kontributor terbesar bagi perekonomian negara yang menawarkan lapangan pekerjaan dan platform ide-ide inovatif (Kung'u 2011). Pengertian UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia sangat penting bagi perekonomian. Pertama, jumlah industri yang besar dan terdapat di dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensi UMKM yang besar di dalam penyerapan tenaga kerja. Ketiga, kontribusi UMKM di dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia lebih besar dari berbagai perusahaan besar lainnya di Indonesia karena UMKM mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan, yaitu produk yang dimiliki adalah produk lokal hasil karya masyarakat yang mampu bersaing dengan produk impor dan daya serap tenaga kerja yang tinggi. (David Wijaya, 2018).

Peneliti *Center of Indonesian Policy Studies* (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai peningkatan kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan. Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Ia mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34% pada tahun 2017, kontribusi ini pada dasarnya masih bisa ditingkatkan mengingat peran UMKM dalam posisi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7%.

Dalam data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia, jumlah UMKM tidak berkurang tetapi meningkat terus bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai pada tahun 2012. Pada jaman itu, jumlah usaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit, dan dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99% sisanya 4.968 unit atau sebesar 0,01% adalah usaha besar. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial untuk industri jasa keuangan terutama bank untuk menyalurkan pembiayaan karena sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki atau kekurangan akses pembiayaan perbankan. (David Wijaya, 2018)

Dengan semakin berkembangnya usaha, para pelaku UMKM dituntut untuk menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Wildan Nururfan (2019) salah satu manfaat dari laporan keuangan yaitu menjadi bahan pertimbangan pemilik usaha sebelum mengambil keputusan bisnis. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisa kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja serta arus kas usaha.

UMKM menghadapi berbagai kendala dan/atau permasalahan yang disebabkan oleh 1) modal yang sangat terbatas 2) urusan perizinan yang berlaku di Indonesia 3) sumber daya manusia 4) kurangnya inovasi dan kreatifitas para pelaku UMKM 5) gagap terhadap teknologi terkini. Semakin berkembangnya sebuah usaha, seperti untuk meningkatkan pendanaan dan kinerja usaha maka perlu berhubungan dengan pihak luar usaha baik pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Pihak bank atau lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kredit bagi pelaku usaha akan mensyaratkan laporan keuangan untuk melihat kelayakan dalam pemberian kredit.

Tetapi bank dan lembaga keuangan lainnya menghadapi kesulitan untuk menilai proposal pinjaman dari UMKM yang tidak memiliki catatan akuntansi dan keuangan yang tepat (Mubiroh & Ruscitarsi, 2019).

Tarmizi (2015) mengatakan bahwa hampir semua pelaku UMKM yang berada di Indonesia hanya mencatat keuangan dari sumber pemasukan dan sumber pengeluaran uang. Dengan kata lain, UMKM hanya mencatat keuangan usahanya sesuai arus kas atau berbasis kas tanpa dapat mengestimasi akrual pelaporan. Hal ini menyebabkan UMKM tidak memiliki pencatatan laporan keuangan dan kesulitan saat melakukan pengajuan kredit dari kreditur, padahal kreditur terutama perbankan menginginkan setiap nasabah peminjam kredit memiliki laporan keuangan sehingga nasabah yang diberi pinjaman kredit dapat mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam. Permasalahan tersebut terjadi karena UMKM tidak terbiasa mencatat dan menyusun laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan sistem akuntansi yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku, para pelaku UMKM mengaku sulit membuat laporan keuangan dikarenakan tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai, dan belum mengetahui pentingnya menerapkan dan menyusun laporan keuangan bagi kelangsungan usahanya. Padahal UMKM memiliki kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta menyerap banyak tenaga kerja produktif sehingga diharapkan UMKM dapat mengerti cara penyusunan laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku agar UMKM dapat mengetahui perkembangan dan kinerja usahanya.

Menurut informasi yang dikutip dalam *Press Release* kegiatan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Juni 2016, mayoritas UMKM di Indonesia sulit mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari perbankan atau sumber pendanaan lainnya dikarenakan UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku di industri keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pelaku UMKM apabila ingin mengembangkan usahanya, karena dengan adanya laporan keuangan pelaku UMKM

dapat mengetahui tentang kondisi usahanya dan dapat mengetahui informasi yang terdapat dalam pencatatan atau pembukuan laporan keuangan tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yananto Mihadi Putra (2018), yaitu tentang pemetaan penerapan standar akuntansi keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan memiliki kesimpulan bahwa mayoritas pemilik atau pengelola UMKM menganggap pentingnya pemahaman tentang SAK EMKM sehingga menginginkan adanya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai SAK EMKM dan mayoritas UMKM tersebut belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya karena memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik ataupun pengelola UMKM tersebut.

Penelitian ini penting karena dilihat dari uraian diatas timbul pertanyaan bagaimana penerapan dan penyusunan laporan keuangan bagi para pelaku UMKM pada kota lainnya sesuai standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK-EMKM) yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2018 yang bertujuan untuk merancang sistem akuntansi sederhana untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang dapat membantu dan mempermudah pemilik usaha dalam membuat laporan keuangannya berdasarkan standar yang berlaku saat ini sehingga dapat digunakan untuk memenuhi syarat pengambilan kredit di perbankan atau lembaga keuangan lainnya agar dapat menambah modal usaha sehingga UMKM dapat memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian di Indonesia.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM UNTUK PENGAJUAN KREDIT DI PERBANKAN PADA KECAMATAN BEKASI TIMUR”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Bekasi Timur ?
2. Bagaimana pengajuan kredit di perbankan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Bekasi Timur.
2. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pengajuan kredit di perbankan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

a.) Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan kajian akuntansi tentang penerapan dan penyusunan laporan keuangan bagi para pelaku UMKM di Indonesia, dan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang UMKM.

b.) Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran pemikiran dan masukan bagi pihak – pihak terkait tentang penerapan dan penyusunan laporan keuangan pelaku UMKM sebelum melakukan pengambilan kredit di bank atau lembaga keuangan lainnya.

c.) Bagi pembuat kebijakan / keputusan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian akuntansi tentang standar penyusunan laporan keuangan (SAK-EMKM) bagi pelaku UMKM di Indonesia yang efisien dan mudah dimengerti oleh pelaku UMKM yang tidak mengerti ilmu akuntansi, serta menjadi bahan pertimbangan untuk bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan kredit bagi pelaku UMKM di Indonesia.

1.5 Batasan masalah

Berdasarkan data diatas tidak semua permasalahan yang ada pada UMKM akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian dapat fokus dan mendalam. Pada penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan penerapan SAK EMKM yang berlaku di Indonesia pada beberapa UMKM yang berada di Kecamatan Bekasi Timur sesuai dengan ketentuan kriteria yang telah dibuat oleh peneliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dari penelitian, dengan memilih rumusan permasalahan, sehingga menghasilkan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, dengan batasan masalah dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang literatur atau landasan teori yang mendasari topik penelitian yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data berdasarkan kuisioner yang telah dibagikan oleh peneliti dan telah diisi, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah oleh peneliti, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dan menjelaskan hasil penelitian serta memberikan saran sebagai tindak lanjutan untuk memperbaiki penelitian yang selanjutnya.

